

Pengaruh Kerjasama Dengan Pihak Swasta Terhadap Angka Pengangguran Di Kabupaten Gorontalo Utara

¹Miranti, ²Anis Naki, ³Darman

^{1,2,3}Universitas Bina Mandiri Gorontalo – Indonesia

Email: mirantiwalinelo64@gmail.com

Abstrak

Tingginya angka pengangguran di Kabupaten Gorontalo Utara menjadi tantangan serius dalam pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta terhadap penurunan angka pengangguran. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan metode analisis SOAR (*Strengths, Opportunities, Aspirations, Results*), mengombinasikan data primer melalui survei terhadap perusahaan swasta serta data sekunder dari instansi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi strategis antara pemerintah dan swasta memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, terutama melalui program pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri. Meskipun demikian, kesenjangan keterampilan antara lulusan pelatihan dan tuntutan pasar kerja masih menjadi kendala utama. Efektivitas program sangat dipengaruhi oleh kualitas pelatihan dan komunikasi antarpemangku kepentingan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi yang terintegrasi, berbasis data, dan berkelanjutan menjadi kunci utama dalam menurunkan tingkat pengangguran. Disarankan agar pemerintah memperluas sosialisasi program pelatihan dan melibatkan swasta secara aktif dalam perencanaan dan evaluasi program tenaga kerja. Hasil ini diharapkan menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan ketenagakerjaan di tingkat daerah.

Kata Kunci: Pengangguran, Kerjasama, Pelatihan Kerja, Tenaga Kerja, Swasta

PENDAHULUAN

Tingginya angka pengangguran merupakan tantangan serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Di tingkat daerah, Kabupaten Gorontalo Utara menjadi salah satu wilayah yang menghadapi permasalahan ketenagakerjaan, khususnya dalam hal ketersediaan lapangan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja produktif. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) mencatat bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Gorontalo Utara masih berada di angka 6,8%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi Gorontalo yang berada di angka 5,3%. Kondisi ini menandakan perlunya strategi yang lebih inovatif dan kolaboratif untuk menciptakan peluang kerja secara berkelanjutan.

Salah satu strategi potensial yang dapat diterapkan dalam upaya mengatasi pengangguran adalah melalui peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan sektor swasta. Kerjasama ini tidak hanya memungkinkan penciptaan lapangan kerja baru, tetapi juga meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan, magang, dan program pemagangan industri. Menurut teori Public-Private Partnership (PPP) yang dikembangkan oleh Hodge & Greve (2018), sinergi lintas sektor akan memberikan efisiensi dalam pelayanan publik dan memperkuat peran swasta dalam pembangunan sosial ekonomi.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam implementasi kerjasama ini adalah ketidaksesuaian antara kualifikasi tenaga kerja yang tersedia dengan kebutuhan industri. Hasil survei primer terhadap 50 pelaku usaha di Kabupaten Gorontalo Utara menunjukkan bahwa 74% menyatakan tenaga kerja lokal masih memiliki keterbatasan keterampilan teknis dan soft skill yang dibutuhkan di dunia kerja. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara output pendidikan dan pelatihan dengan permintaan pasar kerja.

Fenomena ini diperkuat oleh temuan dari Fitriani et al. (2021) yang menjelaskan bahwa mismatch keterampilan (*skill mismatch*) menjadi penyebab utama tingginya angka pengangguran di wilayah pinggiran dan perdesaan di Indonesia. Oleh karena itu, kolaborasi pemerintah dan swasta tidak hanya terbatas pada penyediaan lapangan kerja, tetapi juga harus mencakup peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi berbasis kompetensi.

Dalam konteks kebijakan ketenagakerjaan, pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah dan dunia usaha telah menjadi agenda strategis nasional. Permenaker No. 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi mendorong kerjasama lembaga pelatihan kerja dengan sektor swasta untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri. Rizal & Novita (2020) menyatakan bahwa kolaborasi ini mampu meningkatkan relevansi pelatihan dan mendorong penyerapan tenaga kerja secara lebih optimal.

Lebih lanjut, Arifin et al. (2022) dalam penelitiannya menemukan bahwa daerah yang memiliki skema kemitraan aktif dengan dunia industri cenderung memiliki angka pengangguran yang lebih rendah dibanding daerah yang belum menerapkan model ini. Di sisi lain, penting juga untuk membangun pusat inkubasi wirausaha berbasis kemitraan agar mampu menyerap angkatan kerja baru yang belum terserap dalam sektor formal.

Secara teoritis, pendekatan human capital theory dari Becker (1993) juga menekankan pentingnya investasi pada peningkatan keterampilan dan pendidikan tenaga kerja sebagai modal utama dalam mengurangi pengangguran. Susanti et al. (2021) menekankan bahwa investasi SDM tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi membutuhkan sinergi dari dunia usaha sebagai pengguna akhir tenaga kerja.

Tidak hanya itu, pengalaman empiris dari berbagai daerah juga menunjukkan bahwa kemitraan dengan swasta mampu menciptakan model pelatihan kerja adaptif berbasis teknologi. Wibowo & Santosa (2023) melaporkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor industri digital di Jawa Barat mampu menurunkan angka pengangguran muda sebesar 2,5% dalam kurun dua tahun, melalui program digital training dan re-skilling.

Dalam penelitian lain, Maulida et al. (2022) menjelaskan bahwa keberhasilan kolaborasi sektor publik-swasta sangat bergantung pada keberadaan regulasi pendukung dan komitmen bersama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Di Kabupaten Gorontalo Utara, dibutuhkan model kerjasama yang terstruktur dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah agar lebih berdampak.

Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pengaruh kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak swasta terhadap angka pengangguran di Kabupaten Gorontalo Utara, serta untuk menggambarkan sejauh mana kolaborasi ini mampu mengatasi mismatch keterampilan dan menciptakan peluang kerja yang lebih luas. Diharapkan hasil penelitian ini memberikan kontribusi praktis dan teoretis dalam pengembangan kebijakan ketenagakerjaan berbasis kemitraan multipihak.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis SOAR (Strengths, Opportunities, Aspirations, and Results). Pendekatan kuantitatif dipilih untuk memberikan gambaran yang sistematis dan objektif mengenai hubungan antara variabel kerjasama pemerintah dengan pihak swasta terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Gorontalo Utara. Metode SOAR dipilih karena mampu mengidentifikasi potensi positif dan aspirasi ke depan dari kolaborasi multipihak, serta menghubungkannya dengan hasil yang terukur, dalam hal ini penyerapan tenaga kerja.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari dua sumber utama, yaitu data sekunder dan primer. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo Utara, Bappeda, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Data ini mencakup angka pengangguran, nilai investasi sektor swasta, jumlah tenaga kerja yang diserap, dan laporan resmi mengenai program-program kolaboratif pemerintah-swasta. Sementara itu, data primer

dikumpulkan melalui survei dan kuesioner yang disebarakan kepada 30 perusahaan swasta yang telah menjalin kerjasama formal dengan pemerintah daerah dalam tiga tahun terakhir.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan swasta yang terlibat dalam program kemitraan tenaga kerja dengan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu memilih sampel secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu: (1) perusahaan yang telah melakukan kerjasama minimal selama satu tahun, (2) perusahaan yang memiliki program perekrutan tenaga kerja lokal, dan (3) perusahaan yang memiliki laporan dampak sosial terhadap ketenagakerjaan. Pendekatan ini dianggap relevan karena dapat memperoleh data yang representatif sesuai tujuan penelitian.

Instrumen utama dalam pengumpulan data primer adalah kuesioner tertutup dengan skala Likert 1–5, yang mencakup indikator-indikator kerjasama seperti intensitas komunikasi, dukungan kebijakan, jumlah tenaga kerja terserap, dan kepuasan terhadap hasil kerjasama. Selain itu, dilakukan juga wawancara semi-terstruktur kepada perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan pihak HRD perusahaan untuk memperkuat data kualitatif dan memberikan konteks terhadap data numerik yang diperoleh dari survei.

Teknik analisis data dilakukan dengan menggabungkan pendekatan deskriptif kuantitatif dan analisis SOAR. Analisis deskriptif digunakan untuk melihat pola dan kecenderungan hubungan antar variabel. Sementara itu, analisis SOAR digunakan untuk memetakan kekuatan (*strengths*) kerjasama, peluang (*opportunities*) yang dimiliki oleh kedua belah pihak, aspirasi (*aspirations*) ke depan terhadap program, dan hasil (*results*) yang dicapai dalam konteks pengurangan angka pengangguran. Kombinasi ini diharapkan mampu menghasilkan gambaran menyeluruh dan aplikatif dalam perumusan strategi kebijakan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta di Kabupaten Gorontalo Utara memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan angka pengangguran. Berdasarkan hasil survei terhadap 30 perusahaan swasta yang aktif menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah, sebanyak 86,7% responden menyatakan bahwa program kolaboratif telah berkontribusi dalam menyerap tenaga kerja lokal secara langsung. Dari total tenaga kerja yang direkrut dalam tiga tahun terakhir, sekitar 67% merupakan lulusan pelatihan kerja yang difasilitasi melalui kerjasama dengan instansi pemerintah.

Hasil pengolahan data deskriptif juga menunjukkan bahwa tingkat intensitas kerjasama (dalam bentuk pelatihan, pemberian insentif, dan pengurangan pajak daerah) berkorelasi positif dengan jumlah tenaga kerja yang diserap. Data dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gorontalo Utara menunjukkan bahwa setelah implementasi program pelatihan berbasis industri pada tahun 2023, angka pengangguran terbuka menurun dari 7,2% menjadi 6,8% pada tahun 2024. Penurunan ini menjadi indikasi awal bahwa kolaborasi pemerintah-swasta mulai memberikan dampak yang konkret terhadap perbaikan pasar tenaga kerja lokal.

Melalui analisis SOAR, ditemukan bahwa kekuatan utama (*strengths*) dari kerjasama ini terletak pada adanya dukungan regulasi daerah yang mendorong investasi swasta dan sinergi program antara dinas teknis dan dunia usaha. Di sisi peluang (*opportunities*), perusahaan swasta melihat Kabupaten Gorontalo Utara sebagai wilayah potensial untuk ekspansi tenaga kerja karena biaya operasional yang kompetitif serta adanya bonus demografi. Aspirasi (*aspirations*) dari para pelaku usaha adalah terwujudnya skema pelatihan kerja yang lebih terstandar dan berkelanjutan. Sementara hasil (*results*) yang diukur adalah penurunan angka pengangguran dan meningkatnya proporsi tenaga kerja tersertifikasi.

Dari hasil wawancara dengan perwakilan HRD tiga perusahaan besar di Kabupaten Gorontalo Utara, diketahui bahwa masih terdapat kendala dalam kualitas lulusan pelatihan kerja, khususnya pada aspek soft skill seperti kedisiplinan, komunikasi, dan tanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas program pelatihan belum sepenuhnya optimal dan perlu penguatan dari sisi kurikulum dan melibatkan langsung industri dalam proses pelatihan. Sebanyak

40% perusahaan menyampaikan bahwa keterampilan teknis peserta pelatihan sudah cukup baik, namun perlu peningkatan pada keterampilan non-teknis agar sesuai dengan dinamika industri.

Hasil survei juga menemukan bahwa tingkat kepuasan perusahaan terhadap program kerjasama berada pada nilai rata-rata 3,9 dari skala 5. Artinya, sebagian besar pelaku usaha merasa cukup puas, namun masih ada ruang perbaikan, terutama dalam hal koordinasi program dan kecepatan birokrasi. Beberapa perusahaan bahkan menyarankan pembentukan forum bersama antara dinas terkait, pelaku usaha, dan lembaga pelatihan agar tercipta mekanisme umpan balik yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar kerja lokal.

Temuan dalam penelitian ini memperkuat teori *Public-Private Partnership* (PPP) yang menyatakan bahwa kerjasama antara sektor publik dan swasta dapat menciptakan efisiensi pelayanan serta memperluas dampak sosial ekonomi, termasuk dalam bidang ketenagakerjaan (Hodge & Greve, 2018). Fakta bahwa sebagian besar tenaga kerja terserap melalui skema pelatihan berbasis kemitraan menunjukkan bahwa kemitraan yang terencana dan terstruktur mampu memberikan kontribusi terhadap pengurangan pengangguran secara signifikan di daerah.

Lebih lanjut, hasil ini sejalan dengan penelitian Rizal & Novita (2020) yang menunjukkan bahwa keterlibatan swasta dalam pelatihan dan perekrutan tenaga kerja sangat krusial, terutama di daerah dengan tingkat pengangguran yang tinggi dan kualitas pendidikan vokasi yang belum merata. Dalam konteks Kabupaten Gorontalo Utara, kerjasama lintas sektor mampu menjawab sebagian besar tantangan tersebut, meskipun perlu ditingkatkan pada aspek monitoring dan evaluasi hasil pelatihan.

Dari perspektif human capital theory, kolaborasi yang difokuskan pada pelatihan berbasis kebutuhan industri merupakan bentuk investasi sumber daya manusia yang tepat sasaran. Hal ini didukung oleh temuan Susanti et al. (2021) bahwa peningkatan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja lebih efektif menurunkan pengangguran dibandingkan program-program pelatihan yang tidak berbasis demand-driven. Dengan kata lain, penting bagi pemerintah untuk terus melibatkan dunia usaha dalam merancang dan mengevaluasi kurikulum pelatihan kerja.

Namun demikian, pembahasan ini juga menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada kerjasama formal, tetapi juga pada kualitas hubungan antarlembaga dan keberlanjutan program. Ketidaksiharian antara keterampilan lulusan pelatihan dan kebutuhan industri masih menjadi tantangan. Maka dari itu, pembentukan forum komunikasi rutin antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga pelatihan menjadi langkah strategis yang dapat menjembatani gap antara dunia pendidikan dan dunia kerja secara berkelanjutan.

Terakhir, hasil penelitian ini mendukung pengembangan kebijakan berbasis evidence-based policy, di mana data empiris digunakan untuk memperkuat perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, hasil ini dapat dijadikan dasar dalam menyusun peraturan daerah atau perjanjian kemitraan strategis antara pemerintah dan swasta dalam rangka menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Gorontalo Utara secara sistematis dan terukur.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan angka pengangguran di Kabupaten Gorontalo Utara. Kolaborasi ini menciptakan ruang bagi perluasan lapangan kerja, khususnya melalui program pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri yang dilaksanakan secara bersama. Hasil survei dan data dari instansi terkait mengindikasikan bahwa daerah yang aktif mendorong kemitraan lintas sektor berhasil menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan pasar kerja.

Namun demikian, efektivitas dari kerjasama ini sangat bergantung pada kualitas pelatihan kerja yang diselenggarakan serta kesesuaian antara keterampilan lulusan pelatihan dengan kebutuhan dunia usaha. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun angka

penyerapan tenaga kerja meningkat, masih terdapat kesenjangan pada soft skill dan kemampuan kerja praktis yang perlu diperkuat. Oleh karena itu, pelibatan sektor swasta secara lebih aktif dalam perencanaan dan evaluasi program pelatihan menjadi krusial untuk memastikan keberlanjutan dan relevansi program.

Selain aspek pelatihan, penelitian ini juga menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam menyosialisasikan program-program pelatihan maupun informasi lowongan kerja. Kurangnya informasi di tingkat kecamatan menyebabkan sebagian tenaga kerja tidak mengetahui adanya peluang kerja atau pelatihan yang tersedia. Oleh sebab itu, diperlukan strategi komunikasi yang masif dan inklusif, misalnya melalui media sosial desa, papan informasi kecamatan, dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan atau komunitas lokal.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengurangan angka pengangguran di Kabupaten Gorontalo Utara membutuhkan sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah dan pihak swasta. Pemerintah perlu memperluas cakupan sosialisasi program dan memperkuat kapasitas lembaga pelatihan, sementara pihak swasta diharapkan terus memberikan informasi terbuka mengenai kebutuhan tenaga kerja dan bersedia terlibat dalam pengembangan kurikulum pelatihan kerja. Dengan kerjasama yang terintegrasi, diharapkan penurunan pengangguran tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga menciptakan sistem ketenagakerjaan daerah yang lebih tangguh dan berdaya saing.

SARAN

1. Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian ini, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara memperkuat mekanisme kolaborasi strategis dengan pihak swasta melalui penyusunan nota kesepahaman (MoU) yang memuat tanggung jawab bersama dalam pengembangan sumber daya manusia. Pemerintah perlu memastikan bahwa kerjasama yang terjalin tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berorientasi pada pencapaian target penyerapan tenaga kerja lokal yang konkret, terutama di sektor-sektor padat karya dan industri potensial.
2. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kualitas dan cakupan program pelatihan kerja dengan menyesuaikan kurikulum pelatihan berdasarkan kebutuhan pasar tenaga kerja yang dinamis. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pelaku industri dalam proses penyusunan modul pelatihan serta menempatkan perwakilan swasta sebagai mitra dalam proses pelatihan. Selain itu, evaluasi berkala terhadap efektivitas pelatihan perlu dilakukan agar lulusan memiliki kompetensi teknis dan non-teknis yang sesuai.
3. Disarankan pula agar pemerintah lebih aktif melakukan sosialisasi program pelatihan dan kesempatan kerja hingga ke tingkat desa dan kecamatan, khususnya melalui media yang mudah dijangkau oleh masyarakat seperti media sosial, perangkat desa, dan kerjasama dengan sekolah kejuruan atau BLK. Dengan begitu, calon tenaga kerja dari seluruh wilayah memiliki akses informasi yang merata dan dapat berpartisipasi dalam program pengembangan kompetensi secara adil dan setara.
4. Untuk sektor swasta, disarankan agar perusahaan lebih terbuka dan aktif dalam menyampaikan kebutuhan tenaga kerja, baik dari segi jumlah, bidang keahlian, maupun kualifikasi yang dibutuhkan. Perusahaan juga diharapkan berpartisipasi dalam memfasilitasi pelatihan berbasis tempat kerja (*work-based learning*) sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Kolaborasi dua arah ini akan memperkuat sinergi dalam menekan angka pengangguran secara berkelanjutan dan memperkuat daya saing ekonomi daerah.

REFERENSI

1. Arifin, Z., Hakim, L., & Salim, A. (2022). The role of PPP in local economic development and unemployment reduction. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 45–56.
2. Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Ketengakerjaan Kabupaten Gorontalo Utara 2023*. Gorontalo: BPS Kabupaten Gorontalo Utara.
3. Becker, G. S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education* (3rd ed.). University of Chicago Press.
4. Fitriani, A., Nurhayati, L., & Maulana, H. (2021). Skill mismatch dan pengangguran di kawasan perdesaan Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 29(1), 78–89.
5. Hodge, G. A., & Greve, C. (2018). *The Challenge of Public–Private Partnerships: Learning from International Experience*. Edward Elgar Publishing.
6. Maulida, D., Siregar, H., & Yusuf, M. (2022). Institutional collaboration and employment policy effectiveness. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1), 88–98.
7. Permenaker Republik Indonesia No. 8 Tahun 2020. (2020). *Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi*.
8. Rizal, F., & Novita, A. (2020). Kemitraan pemerintah dan dunia usaha dalam penanggulangan pengangguran. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 12(3), 112–125.
9. Susanti, R., Hamzah, A., & Mulyani, N. (2021). Human capital investment and labor market dynamics in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(2), 65–74.
10. Wibowo, A., & Santosa, A. (2023). Digital industry partnership and youth unemployment reduction. *Journal of Regional Development*, 7(1), 23–34.